

BAB 1

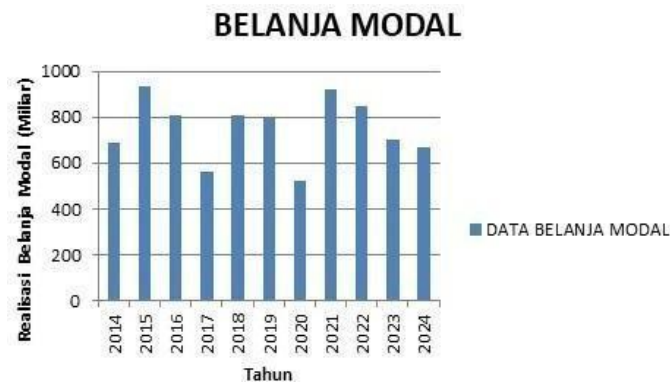
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja modal merupakan indikator penting dari arah kebijakan fiskal suatu pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Melalui belanja modal, pemerintah daerah membiayai pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, serta investasi yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks ini, efektivitas belanja modal menjadi parameter utama untuk menilai sejauh mana kapasitas daerah dalam mengelola anggaran secara produktif. Menurut Mardiasmo (2009), belanja modal mencerminkan visi pembangunan jangka panjang karena berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung pemaparan mengenai pentingnya belanja modal dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang, maka perlu ditunjukkan data empiris terkait variabel–variabel yang mempengaruhinya pada riset ini. Gambar berikut menyajikan tren realisasi belanja modal selama periode 2014 hingga 2024 yang memberikan gambaran jelas mengenai fluktuasi serta arah pertumbuhan realisasi belanja modal kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun.

Gambar 1. 1 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik ,2024 (Data Diolah)

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tren belanja modal di Kabupaten Sidoarjo mencerminkan fluktuasi yang cukup tajam. Dari Rp 691,16 miliar pada tahun 2014, belanja modal sempat mencapai puncaknya di Rp 936,19 miliar pada tahun 2015, namun turun substansial menjadi Rp 519,25 miliar pada tahun 2020 akibat pandemi. Pada tahun 2021 terjadi pemulihan, namun setelah itu kembali menurun dan hanya mencapai Rp 668,08 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan adanya pengaruh dari berbagai faktor, baik internal (seperti kapasitas fiskal daerah) maupun eksternal (seperti pandemi dan kebijakan nasional). Namun, belanja modal tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kelembagaan, termasuk tingkat kemandirian fiskal daerah.

Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi memiliki kapasitas fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pada sektor produktif seperti belanja modal. Hal ini sejalan dengan pandangan Halim (2007) yang menyebutkan bahwa tingginya tingkat kemandirian fiskal memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan anggaran, termasuk dalam mendorong investasi publik. Oleh karena itu, kemandirian daerah menjadi kunci dalam mengkaji pengeluaran belanja modal.

Kemandirian daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu

membiayai dan mengembangkan pembangunan wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki, tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan pemerintah pusat. Tingkat kemandirian yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan dan memanfaatkan dana publik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi regional, pemerintah daerah berperan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan aset, serta pemanfaatan kekayaan daerah secara produktif. Pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci bagi daerah untuk mendongkrak daya saing antarwilayah dan mewujudkan tujuan otonomi daerah yang sejati (Galang & Handyani, 2019). Di bawah ini akan ditunjukkan grafik rasio kemandirian daerah Kabupaten dari tahun 2014 hingga 2024.

Gambar 1. 2 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Dari grafik di atas mencerminkan bahwa aspek kemandirian daerah yang direpresentasikan melalui rasio pendapatan asli daerah (PAD) atas total pendapatan mencerminkan tren peningkatan secara umum. Pada tahun 2014 tingkat kemandirian daerah tercatat sejumlah 34,07% dan meningkat menjadi 44,12% pada

tahun 2024. Walaupun terjadi fluktuasi di beberapa tahun (misalnya penurunan pada 2018 dan 2019), namun tren jangka panjang mencerminkan upaya konsisten dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Hal ini penting karena daerah yang mandiri secara fiskal cenderung memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan belanja, termasuk belanja modal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga turut menentukan besaran dan prioritas belanja modal. Ketika daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, maka potensi peningkatan pendapatan daerah pun membesar. Ini berimplikasi langsung pada kemampuan fiskal pemerintah untuk memperluas basis belanja modal. Seperti dinyatakan oleh Musgrave & Musgrave (1989), dalam sistem fiskal yang sehat, pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah membentuk hubungan dua arah yang saling menguatkan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan ditunjukkan gambar grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2014 hingga 2024.

Gambar 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Dari gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sidoarjo mencerminkan performa yang relatif stabil sebelum pandemi COVID-19, yaitu berada di kisaran 5–6%. Dampak pandemi pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi pertumbuhan hingga -3,69%. Namun demikian, pemulihan berlangsung cepat, dengan pertumbuhan mencapai 7,53% pada tahun 2022, lalu kembali stabil di atas 5% pada 2023 dan 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan kapasitas daerah dalam menciptakan output, lapangan kerja, serta daya beli yang pada akhirnya dapat mendorong penerimaan daerah dan kebutuhan akan belanja modal, khususnya dalam sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, tekanan demografis dalam bentuk peningkatan jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi struktur belanja pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang terus bertambah menuntut peningkatan penyediaan sarana dan prasarana publik. Dalam konteks ini, belanja modal menjadi instrumen utama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Anis & Andi (2007) menekankan bahwa daerah dengan pertumbuhan populasi tinggi memerlukan strategi belanja modal yang lebih agresif untuk menghindari terjadinya *backlog* pelayanan publik. Di bawah ini akan ditunjukkan grafik jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2014 hingga 2024.

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo 2014-2024



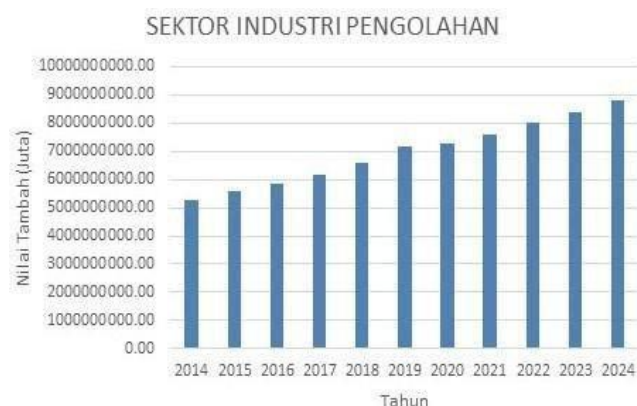
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk juga menjadi variabel penting dalam pengelolaan belanja modal. Data mencerminkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo relatif fluktuatif selama periode 2014–2024. Penduduk tercatat sejumlah 2.127.043 jiwa pada 2014 dan meningkat menjadi 2.027.874 jiwa pada 2024, dengan beberapa penurunan drastis di tahun- tahun tertentu, seperti tahun 2016 dan 2022. Perubahan ini bisa disebabkan oleh migrasi, pencatatan ulang, atau dampak pandemi. Semakin besar jumlah penduduk yang harus dilayani oleh pemerintah daerah, semakin besar pula kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang pada akhirnya akan tercermin dalam peningkatan belanja modal.

Industri pengolahan, sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo, juga memiliki kontribusi substansial atas kemampuan fiskal daerah dan arah belanja modal. Dengan struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor ini, Sidoarjo memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD melalui pajak dan retribusi industri. Namun pertanyaannya, sejauh mana keberadaan industri pengolahan benar-benar berkontribusi atas peningkatan belanja modal dan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata. Tanpa adanya belanja modal yang diarahkan secara strategis,

kehadiran sektor industri dapat menimbulkan tekanan lingkungan dan sosial yang tidak seimbang (Fajar, 2018). Di bawah ini akan ditampilkan grafik nilai tambah sektor industri pengolahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 hingga 2024.

Gambar 1. 5 Nilai Tambah Industri Pengolahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Dari data grafik di atas dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan dalam struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Nilai tambah industri pengolahan meningkat secara substansial dari Rp 52,76 juta pada tahun 2014 menjadi Rp 88,21 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan dinamika industri lokal yang kuat dan berperan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kontribusi yang besar atas PDRB, industri pengolahan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang memerlukan dukungan belanja modal seperti penyediaan infrastruktur, fasilitas produksi, dan akses logistik.

Kondisi terkini mencerminkan bahwa meskipun PAD Sidoarjo mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, alokasi belanja modal belum mencerminkan proporsi yang konsisten dalam APBD. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal dan internal atas belanja modal, seperti kondisi fiskal daerah, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan layanan publik dan infrastruktur.

Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sidoarjo mencerminkan tren meningkat secara bertahap, Namun, pada beberapa tahun seperti 2018 dan 2019 justru mengalami penurunan. Artinya, masih ada ketergantungan pada dana transfer pusat, yang dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal secara mandiri. Sementara itu pada variabel pertumbuhan ekonomi dinamika ini mencerminkan bahwa kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat berdampak langsung pada kapasitas fiskal dan belanja modal.

Jumlah penduduk Sidoarjo juga mengalami perubahan yang tidak stabil, Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi dan perubahan metode pendataan. Variasi jumlah penduduk berdampak pada kebutuhan belanja modal, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Lalu meningkatnya aktivitas industri pengolahan tentu membutuhkan dukungan infrastruktur, transportasi, dan fasilitas publik yang biasanya dibiayai dari belanja modal.

Meskipun Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dari sisi kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi yang stabil, jumlah penduduk yang padat, serta berkembangnya sektor industri pengolahan, namun realisasi belanja modal pemerintah daerah belum mencerminkan pemanfaatan potensi tersebut secara optimal. Belanja modal sebagai salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan investasi jangka panjang yang bersifat produktif.

Namun, data mencerminkan belanja modal di Kabupaten Sidoarjo cenderung berfluktuasi dan belum mencerminkan kecenderungan peningkatan yang

konsisten sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan potensi ekonomi daerah dan kebijakan pengeluaran pemerintah, khususnya pada aspek belanja modal. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara mandiri dan efisien, salah satunya melalui optimalisasi belanja modal.

Faktor-faktor seperti tingkat kemandirian daerah, yang mengindikasikan seberapa besar kemampuan daerah membiayai kebutuhannya tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat, seharusnya berpengaruh atas peningkatan alokasi belanja modal. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan sektor industri pengolahan yang terus berkembang, seharusnya menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk mendorong belanja modal dalam rangka mempercepat pembangunan. Akan tetapi, realita yang terjadi justru mencerminkan bahwa peningkatan potensi-potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan belanja modal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam menyelaraskan antara potensi ekonomi dan arah pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian empiris mengenai pengaruh kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan sektor industri pengolahan atas belanja modal pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo merupakan yang cukup stabil di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang besar, tingkat kemandirian fiskal yang meningkat, serta sektor industri pengolahan yang berkembang pesat. Keempat variabel ini semestinya menjadi pendorong utama dalam peningkatan belanja modal sebagai bentuk investasi pemerintah

daerah. Namun demikian, fakta mencerminkan bahwa realisasi belanja modal di kabupaten Sidoarjo tidak selalu mencerminkan potensi yang dimiliki. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa alokasi anggaran belum diarahkan secara optimal untuk mendorong pembangunan jangka panjang.

Riset ini merupakan replikasi dari riset Galang dan Handayani (2019) tentang Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Populasi yang dipakai ialah Kabupaten atau Kota GERBANGKERTOSUSILA Tahun 2013 hingga 2018. Hasil risetnya membuktikan bahwa kemandirian daerah dan jumlah penduduk yang berpengaruh positif atas belanja modal pemerintah daerah sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif atas belanja modal pemerintah daerah. Sedikit berbeda dengan riset tersebut, riset saya memakai variabel kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan sektor industri pengolahan dengan rentang waktu riset dari tahun 2014 hingga 2024. Dengan demikian *research gap* riset ini terletak pada variabel dan tahun yang dipakai oleh masing-masing peneliti.

Oleh karena itu riset ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur (*research gap*) dan memberikan kontribusi empiris sekaligus rekomendasi kebijakan yang dapat dipakai oleh akademisi maupun pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan fiskal yang lebih tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang. Melalui riset ini, diharapkan pula muncul pemahaman baru mengenai bagaimana arah belanja modal dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, tekanan penduduk, dan potensi sektor unggulan. Dengan demikian, kebijakan penganggaran daerah tidak hanya bersifat

reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan, demi terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan kompetitif.

Kabupaten Sidoarjo masih perlu fokus pada kestabilan dan peningkatan belanja modal pemerintah daerah agar perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Maka dari itu, dengan riset berjudul **“PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, INDUSTRI PENGOLAHAN, TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH SIDOARJO”** dan memakai variabel bebas terkait yang diharapkan penulis mampu untuk menganalisis serta meningkatnya belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, alhasil bisa ditarik suatu rumusan masalah pada riset ini yakni:

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo?
4. Apakah sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, dapat diketahui tujuan risetnya ialah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo.

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo.

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo.

Untuk mengetahui pengaruh sektor industri pengolahan terhadap belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, penulis memakai ruang lingkup kuantitatif deskriptif dengan memakai analisa data *time series*. Pada riset ini data yang dipakai ialah data sekunder berbentuk *time series* dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai tujuan. Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Web Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sidoarjo (BAPPEDA) pada periode tahun 2014 sampai 2024.

Ruang lingkup riset ini ialah untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo. Riset ini memakai variabel bebas kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan sektor industri pengolahan. Untuk variabel dependen sendiri yakni belanja modal pemerintah daerah Sidoarjo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari riset ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis: Riset ini memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai hubungan antara variabel- variabel makroekonomi dan fiskal daerah atas alokasi belanja modal. Penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis kuantitatif serta berpikir kritis dalam mengevaluasi kebijakan keuangan daerah berdasarkan data empiris yang relevan.
- b. Bagi Universitas: Riset ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan. Universitas sebagai lembaga akademik dapat menjadikan hasil riset ini sebagai referensi atau bahan kajian dalam pengembangan kurikulum, serta sebagai literatur tambahan bagi mahasiswa lain yang tertarik pada topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Riset ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja modal oleh pemerintah daerah. Melalui riset ini, masyarakat dapat mengetahui faktor- faktor apa saja yang mendorong atau menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayahnya, alhasil dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah.

- b. Bagi Pembaca: Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam mengevaluasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan belanja modal. Dengan memahami pengaruh kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan industri pengolahan secara simultan, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi anggaran yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.